BAB VI

SIMPULAN DAN IMPLIKASI

- 6.1 Simpulan
- 6.1.1 Kondisi Empirik Kemitraan Sekolah dan DUDI di SMKN 1 Kota Bekasi

Kemitraan SMKN 1 Kota Bekasi dengan DUDI dalam Dunia usaha dan Dunia Industri telah menjalin hubungan kerja yang kuat dan efektif. Selama pelaksanaannya, sekolah dengan terampil berkomunikasi dengan mitranya untuk memastikan keberhasilan dan kelancaran kemitraan. Selalu berusaha untuk memperbaharui kerjasama dan menumbuhkan kepercayaan, serta melakukan evaluasi menyeluruh setelah kegiatan selesai untuk membangun keemitraan yang berkualitas tinggi. Kemitraan antara SMKN 1 Kota Bekasi dengan DUDI merupakan bentuk kemitraan yang saling menguntungkan.

6.1.2 Implementasi Manajemen Kemitraan Sekolah antara dengan DUDI di SMKN 1 Kota Bekasi

Manajemen kemitraan antara SMK Negeri 1 Kota Bekasi dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) mencerminkan suatu upaya strategis dan sistematis dalam membangun hubungan yang saling menguntungkan untuk peningkatan mutu pendidikan vokasional. Berdasarkan temuan empiris dari berbagai aspek manajerial mulai dari perencanaan, pengorganisasian, implementasi, hingga pengawasan dan evaluasi serta dapat disimpulkan bahwa kemitraan yang dijalankan telah berjalan secara fungsional, meskipun masih menghadapi tantangan tertentu di tingkat operasional.

1) Perencanaan merupakan langkah awal yang menentukan keberhasilan kemitraan antara sekolah dan industri. tanpa perencanaan yang matang, kemitraan yang dibangun akan kehilangan arah dan sulit untuk diimpelementasikan secara efektif. Pada tahap ini SMK Negeri 1 Kota Bekasi melibatkan pemetaan industri yang relevan dengan bidang keahlian yang diajarkan di sekolah. Setiap program keahlian yang ada

harus memiliki daftar industri yang sesuai dengan bidangnya, sehingga kemitraan yang dibangun dapat memberikan manfaat langsng bagi siswa dan mitra industri. selain itu, perencanaan juga mencakup penyusunan dokumen rencana strategis kemitraan. Dokumen ini harus memuat tujuan kemitraan, bentuk-bentuk kemitraan yang diharapkan, serta target jangka pendek dan jangka panjang yang ingin dicapai. Dengan adannya dokumen ini, sekolah memiliki panduan yang jelas dalam mengelola kemitraan dengan dunia industri. Salah satu aspek penting dalam perencanaan kemitraan adalah penyesuaian kurikulum dengan standar industri. kurikulum yang diterapkan di SMK harus relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan tenaga kerja di dunia industri. oleh karena itu, keterlibatan industri dalam penyusunan kurikulum menjadi suatu keharusan. Industri dapat memberikan masukan mengenai kompetensi yang dibutuhkan serta memantu dalam penyediaan sarana praktik yang sesuai dengan standard industri. Perencanaan kemitraan yang dilakukan oleh SMK Negeri 1 Kota Bekasi masih belum optimal karena tidak adanya sistem basis data yang terorganisir mengenai industri yang relevan dengan program keahlian sekolah dan mitra industri belum banyak terlibat dalam revitalisasi kurikulum, menyebabkan masih adanya kesenjangan keterampilan yang dimiliki oleh siswa.

2) Setelah perencanaan disusun, langkah berikutnya adalah Pengorganisasian pengorganisasian kemitraan. bertujuan untuk mengelola sumber daya yang tersedia agar kemitraan dapat berjalan secara sistematis dan efektif. Salah satu langkah awal dalam pengorganisasian adalah pembentukan tim khusus yang bertanggung jawab dalam mengelola kerja sama antara sekolah dan industri. Tim ini biasanya terdiri dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang hubungan industri, serta perwakilan dari dunia usaha dan industri. Keberadaan tim ini sangat penting karena mereka bertugas menjalin komunikasi dengan dunia industri, mengatur program magang, serta memastikan bahwa semua program kemitraan berjalan sesuai dengan rencana yang telah disusun. Pembuatan perjanjian kerja sama atau Memorandum of Understanding (MoU) menjadi langkah berikutnya dalam tahap pengorganisasian. MoU adalah dokumen resmi yang mengatur hak dan kewajiban antara sekolah dan industri dalam kemitraan yang dibangun. Dalam dokumen ini, harus dijelaskan dengan rinci bentuk kerja sama yang dilakukan, seperti program magang, penyelarasan kurikulum, sertifikasi kompetensi, serta mekanisme monitoring dan evaluasi yang akan diterapkan. Selain itu, sekolah perlu menjalin koordinasi yang erat dengan pihak industri dan pemerintah. Koordinasi yang baik akan memastikan bahwa kemitraan dapat berjalan secara optimal dan mendapatkan dukungan yang diperlukan, baik dari segi kebijakan maupun pendanaan. Koordinasi ini yang masih perlu dioptimalkan oleh SMK Negeri 1 Bekasi, karena dari hasil penelitian diperoleh informasi bahwa perlu adanya upaya pendekatan yang starategis untuk lebih menarik industri agar mau menjalin kemitraan dengan sekolah. Dengan memberikan insentif bagi industri, melalui kerjasa sama dengan pemerintah daerah untuk memberikan insentif pajak atau sertifikat khusus bagi industri yang bermitra dengan sekolah.

3) Impelementasi program kemitraan ini mencakup berbagai bentuk program yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa dan industri. Salah satu bentuk utama implementasi kemitraan adalah program magang atau praktik kerja lapangan (PKL) dan *Teaching Factory* (TeFa). Program ini memberikan kesempatan bagi siswa untuk mendapatkan pengalaman kerja langsung di dunia industri. Dengan menjalani magang, siswa dapat mengasah keterampilan teknis mereka, memahami budaya kerja industri, serta memperluas jaringan profesional yang akan bermanfaat bagi karier mereka di masa depan. Selain program magang, sekolah juga dapat mengundang tenaga ahli dari industri untuk memberikan pelatihan atau workshop bagi siswa dan guru. Pembelajaran berbasis industri ini

membantu siswa memperoleh wawasan tentang perkembangan terbaru di dunia kerja serta menyesuaikan keterampilan mereka dengan standar industri. Kemitraan yang baik juga harus mencakup program sertifikasi kompetensi. Dengan adanya sertifikasi yang diakui oleh dunia kerja, lulusan SMK memiliki nilai tambah yang membuat mereka lebih mudah diterima di dunia industri. Namun, tantangan muncul pada aspek kesesuaian waktu pelaksanaan, akses lokasi mitra industri, serta keterbatasan jumlah DUDI yang siap menerima siswa dalam jumlah besar secara bersamaan.

4) Agar program kemitraan dapat berjalan dengan baik, diperlukan pengawasan yang ketat. Pengawasan bertujuan untuk memastikan bahwa semua kegiatan yang telah direncanakan dapat berjalan sesuai dengan harapan dan memberikan manfaat maksimal bagi semua pihak yang terlibat. Salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan adalah monitoring terhadap kegiatan kemitraan. Sekolah harus secara rutin mengevaluasi bagaimana program-program yang telah dijalankan dapat memberikan manfaat bagi siswa dan dunia industri. Selain itu, pengawasan juga mencakup evaluasi kinerja siswa selama menjalani magang atau PKL. Sekolah harus bekerja sama dengan dunia industri dalam memberikan bimbingan dan pengawasan terhadap siswa selama mereka berada di tempat kerja. Dengan demikian, pengalaman yang didapatkan oleh siswa selama magang benar-benar relevan dengan bidang keahlian mereka. Jika terjadi kendala dalam pelaksanaan kemitraan, sekolah harus segera mencari solusi dengan berkoordinasi bersama pihak industri. Penyelesaian masalah secara cepat dan efektif akan memastikan bahwa kemitraan tetap berjalan dengan baik dan tidak mengganggu proses pembelajaran siswa. Evaluasi dapat dilakukan dengan menilai keberhasilan program magang dan pelatihan yang telah dilaksanakan. Sekolah perlu mengidentifikasi apakah siswa yang telah mengikuti program magang mengalami peningkatan keterampilan dan apakah

pengalaman mereka sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan di dunia industri. Selain itu, kesesuaian kurikulum dengan standar industri juga harus terus dievaluasi. Sekolah harus memastikan bahwa materi pembelajaran yang diberikan tetap relevan dengan kebutuhan dunia kerja dan selalu diperbarui sesuai dengan perkembangan industri. Indikator lain yang dapat digunakan dalam evaluasi adalah tingkat daya serap lulusan di dunia kerja. Jika semakin banyak lulusan yang diterima bekerja di industri yang sesuai dengan bidang keahlian mereka, maka kemitraan dapat dikatakan berhasil. Dunia industri juga harus memberikan umpan balik kepada sekolah mengenai kualitas lulusan yang telah bekerja di tempat mereka. Dengan adanya umpan balik ini, sekolah dapat melakukan perbaikan dalam sistem pembelajaran agar lebih sesuai dengan kebutuhan industri. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan, sekolah dapat menyusun rekomendasi strategis untuk meningkatkan efektivitas kemitraan di masa mendatang. Perbaikan yang dilakukan secara terusmenerus akan memastikan bahwa kerja sama antara sekolah dan industri tetap relevan dan bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat. Pengawasan dan evaluasi kemitraan dengan DUDI yang dilakukan di SMK Negeri 1 Kota Bekasi menunjukkan bahwa pendekatan yang digunakan hanya melibatkan penilaian positif atau negetaif terhadap keberhasilan kegiatan. Oleh karena itu, jika kemitraan dinyatakan berhasil, maka kemitraan dapat dilanjutkan dengan mempertimbangkan aspek-aspek yang relevan. Meskipun upaya evaluasi ini telah berlangsung, namun belum semua hasilnya terdokumentasi secara sistematis dan dijadikan dasar dalam pengambilan kebijakan strategis. Secara keseluruhan SMK Negeri 1 Kota Bekasi telah memiliki fondasi manajemen kemitraan yang cukup kuat. Sekolah mampu menjalin kerja sama dengan berbagai mitra industri yang relevan, membangun sistem kerja yang melibatkan berbagai pihak, serta menciptakan program-program yang aplikatif untuk mendukung kesiapan kerja lulusan. Tantangan-tantangan yang dihadapi lebih bersifat teknis dan dapat diatasi melalui penguatan komunikasi, peningkatan kapasitas tim kemitraan, serta dukungan kebijakan yang lebih fleksibel dari pemerintah daerah dan mitra DUDI.

6.1.3 Model Manajemen Kemitraan Manajemen Sekolah dengan DUDI

Penelitian ini dilakukan melalui suatu tahapan komponen pengembangan model hipotetik manajemen kemitraan antara Sekolah Menengah Kejuruan dengan DUDI sebagai upaya menjembatani kebutuhan sekolah dalam mengembangkan kualitas lulusan peserta didik. Komponen tersebut dilihat dari segi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan serta pengawasan dan evaluasi. Perencanaan dimulai dengan identifikasi kebutuhan sekolah untuk merumuskan kompetensi yang akan dicapai oleh peserta didik dalam kegiatan kemitraan.

Proses pembentukan manajemen kemitraan antara SMKN 1 Kota Bekasi dengan Duniaa Usaha dan Dunia Industri melibatkan langkah berikut ini, seperti yang dilakukan oleh manajemen sekolah: 1) memasukkan komponen-komponen kemitraan dengan DUDI ke dalam visi, misi, dan tujuan sekolah; 2) melakukan analisis internal dan eksternal sekolah; 3) melakukan analisis internal dan eksternal sekolah; 4) menyusun struktur kemitraan sekolah dengan DUDI; 5) proses seleksi untuk mengidentifikasi DUDI dan membentuk kemitraan; 6) menyediakann fasilitas yang memudahkan kerjasama antara sekolah dan DUDI.

Selain itu, analisis dan evaluasi kemitraan sekolah dengan DUDI menunjukkan bahwa pendekatan yang digunakan hanya melibatkan penilaian positif atau negatif terhadap keberhaasilan kegiatan. Oleh karena itu, jika kemitraan dinyatakan berhasil, maka kemitraan dapat dilanjutkan dengan mempertimbangkan aspek-aspek yang relevan. Model hipotetik manajemen kemitraan KOSMIK melalui validasi FGD, sehingga hasil penelitian mengalami perbaikan yan dirancang berdasarkan hasil kajian teoritik dan empirik. Model hipotetik disusun dan dilaksanakan melalui beberapa kegiatan, yaitu : (1) mempelajari dan menganalisis kajian dan wawasan yang berkaitan dengan kemitraan; (2) melakukan diskusi dengan para pakar pendidikan; (3) melakukan diskusi dan meminta masukan dari praktisi DUDI terkait model kemitraan yang dibuat.

Annisa Lutfia, 2025

Sekolah dapat mengevaluasi sejauh mana model tersebut dapat diimplementasikan di sekolah. Kolaborasi dan komunikasi antara Sekolah Menengah Kejurudan dengan DUDI dalam mengimplemntasi model manajemen kemitraan menjadi suatu hal yang sangat substansial.

6.2 Implikasi Penelitian

Penelitian mengenai implementasi manajemen kemitraan antara SMK Negeri 1 Kota Bekasi dengan Dunia Usaha Dunia dan Dunia Industri (DUDI) menghasilkan berbagai temuan penting yang berdampak pada aspek kebijakan, pengembangan teori, dan praktik pendidikan vokasi. Bagian ini menguraikan implikasi dari hasil penelitian tersebut dalam tiga kategori utama: implikasi kebijakan, implikasi teoretis, dan implikasi praktis.

6.2.1 Implikasi Kebijakan

- Penyempurnaan Kebijakan Pendidikan Vokasi, pemerintah perlu melakukan reformulasi terhadap kebijakan pendidikan vokasi agar lebih adaptif terhadap dinamika industri. Penyusunan regulasi baru yang mengakomodasi kolaborasi kurikulum, peran DUDI dalam pembelajaran, dan skema pembiayaan bersama dapat memperkuat efektivitas kemitraan.
- 2) Regulasi tentang Evaluasi dan Akuntabilitas Kemitraan perlu ditetapkan regulasi evaluasi kinerja kemitraan yang bersifat nasional dengan indikator yang terukur, untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas kerja sama antara Sekolah Menengah Kejuruan dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri.

6.2.2 Implikasi Teoritis

Penelitian ini memperkaya kajian teoretis di bidang administrasi pendidikan, khususnya manajemen kemitraan berbasis vokasi. Implikasi teoretis dari penelitian ini antara lain:

 Pengembangan Model Manajemen Kemitraan KOSMIK, temuan dari penelitian ini memberikan landasan untuk menyusun model manajemen kemitraan berbasis co-management, yang menempatkan DUDI tidak hanya

- sebagai pengguna lulusan, tetapi juga sebagai mitra dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pendidikan vokasi.
- 2) Kontribusi terhadap Teori Manajemen Kemitraan Pendidikan, studi ini memperlihatkan pentingnya strategi perencanaan jangka panjang dalam hubungan sekolah dan industri. Hal ini memperkuat konsep dalam teori manajemen strategis yang menekankan pentingnya sinergi lintas sektor untuk mencapai keunggulan kompetitif institusi pendidikan.
- 3) Integrasi Konsep *Link and Match* dalam Administrasi Pendidikan, penelitian ini menegaskan pentingnya integrasi kurikulum dengan kebutuhan industri sebagai manifestasi konkret dari konsep *link and match*. Hal ini membuka ruang untuk pengembangan teori pembelajaran berbasis industri (*industry-based learning*).

6.2.3 Implikasi Praktis

Dalam ranah operasional dan kelembagaan, hasil penelitian ini memberikan beberapa arahan praktis yang dapat dijadikan dasar penguatan implementasi manajemen kemitraan di tingkat satuan pendidikan. Implikasi praktis yang dapat dilakukan adalah:

- Penguatan Kapasitas Manajerial Sekolah. Sekolah perlu meningkatkan kapasitas manajerial dalam mengelola kemitraan secara profesional, termasuk dalam aspek perencanaan, negosiasi kerja sama, dan evaluasi program. Pelatihan bagi kepala sekolah, wakil kurikulum, dan tim hubin menjadi kebutuhan strategis.
- 2) Reorientasi Kurikulum Berbasis Industri. Sekolah harus mampu menyusun kurikulum adaptif dan fleksibel yang menyelaraskan kebutuhan industri dengan capaian pembelajaran. Hal ini dapat dicapai melalui kerja sama dalam penyusunan modul ajar, penyelarasan praktik kerja industri, dan pelibatan industri dalam penilaian kompetensi siswa.
- 3) Peningkatan Peran DUDI dalam Kegiatan Sekolah. DUDI tidak hanya berperan sebagai tempat magang, tetapi juga sebagai mitra dalam pembinaan

- karakter kerja, penyedia pelatihan bagi guru, serta penyumbang inovasi teknologi dan praktik kerja terbaru.
- 4) Pemanfaatan Teknologi untuk Monitoring dan Evaluasi. Pengembangan sistem evaluasi digital berbasis indikator kinerja kemitraan akan membantu sekolah memantau keberhasilan program secara berkelanjutan dan berbasis data. Ini dapat diperkuat melalui platform bersama antara sekolah dan industri.
- 5) Pengembangan Forum Kemitraan Regional. Diperlukan pengembangan forum kemitraan vokasi di tingkat daerah yang melibatkan sekolah, DUDI, pemerintah, dan asosiasi industri, untuk memperkuat ekosistem vokasi dan memperluas jejaring kerja sama lintas sektor.

Implikasi-implikasi di atas diharapkan dapat menjadi dasar bagi pengambil kebijakan, peneliti, dan praktisi pendidikan vokasi untuk mengembangkan model kemitraan yang lebih terintegrasi, adaptif, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas lulusan SMK yang kompeten dan siap kerja.

6.3 Rekomendasi Hasil Penelitian

Mengacu pada simpulan dan implikasi yang telah dirumuskan, benang meraahnya terletak pada bagaimana lembaga sekolah mengelola secara sinergis seluruh aspek manajemen kemitraan sehingga terselenggara kegiatan kemitraan yang mampu memberikan dampak kepada peningkatan kualitas lulusan. Selanjutnya adalah rekomendasi yang peneliti rumuskan sebagai berikut.

6.3.1 Rekomendasi untuk Pihak Sekolah

1) Penguatan Perencanaan Kemitraan Berbasis Kebutuhan Sekolah diharapkan melakukan penyusunan rencana kerja sama dengan DUDI secara lebih terstruktur dan berbasis pada analisis kebutuhan industri (industrial needs analisis). Rencana kerja sama tidak hanya mengacu pada dokumen administratif seperti MoU, tetapi juga harus memuat strategi pengembangan kurikulum adaptif, pengembangan SDM, dan peta kompetensi lulusan yang disesuaikan dengan permintaan pasar kerja.

2) Optimalisasi Tim Manajemen Kemitraan

Sekolah perlu membentuk tim khusus yang bertanggung jawab dalam mengelola kemitraan dengan DUDI secara profesional dan berkelanjutan. Tim ini harus dibekali dengan pelatihan manajemen kolaborasi industri, keterampilan negosiasi, dan pemahaman terkait kebijakan pendidikan vokasional. Tim ini juga sebaiknya melakukan koordinasi rutin dengan mitra industri untuk memastikan sinergi dan kontinuitas program.

3) Integrasi Kemitraan dalam Pembelajaran

Kemitraan dengan DUDI tidak hanya berhenti pada kegiatan magang atau praktik kerja industri, tetapi perlu diintegrasikan dalam proses pembelajaran di kelas. Model pembelajaran berbasis proyek (project-based learning) yang melibatkan DUDI dalam penyusunan dan evaluasi proyek siswa dapat menjadi alternatif untuk memastikan bahwa pembelajaran lebih kontekstual dan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.

6.3.2 Rekomendasi untuk Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI)

Meningkatkan Keterlibatan dalam Penyusunan Kurikulum DUDI diharapkan lebih proaktif dalam memberikan masukan dan terlibat langsung dalam penyusunan kurikulum SMK, agar materi pembelajaran selalu up to date dan mencerminkan kebutuhan kompetensi di dunia kerja yang sesungguhnya.

2) Menyediakan Program Pembimbingan dan Sertifikasi DUDI disarankan untuk tidak hanya menerima siswa magang, tetapi juga menyediakan program pembimbingan (mentoring) dan sertifikasi keterampilan yang dapat menjadi nilai tambah bagi siswa ketika mereka memasuki pasar tenaga kerja.

3) Membangun Program CSR yang Berorientasi Pendidikan

Sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan, DUDI dapat mengalokasikan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) untuk mendukung pengembangan fasilitas pendidikan, pelatihan guru, pengembangan riset terapan, dan pengadaan alat praktik bagi SMK.

6.3.3 Rekomendasi untuk Pemerintah

1) Penguatan Kebijakan Insentif bagi Industri

Pemerintah pusat dan daerah diharapkan memberikan insentif yang menarik bagi perusahaan yang bersedia bermitra dengan SMK, baik dalam bentuk keringanan pajak, akses prioritas program pemerintah, maupun pengakuan dalam bentuk penghargaan sosial dan ekonomi.

2) Pembentukan Forum Kemitraan Pendidikan Vokasional Pemerintah perlu memfasilitasi forum kemitraan antara SMK dan DUDI di tingkat kota/kabupaten, provinsi, dan nasional. Forum ini bertujuan sebagai media pertukaran informasi, diskusi, pembelajaran bersama, dan penjaringan aspirasi yang relevan dalam memperkuat kebijakan pendidikan vokasional berbasis industri.

3) Monitoring dan Evaluasi Berkala

Pemerintah disarankan untuk melakukan pengawasan dan evaluasi kemitraan secara berkala melalui sistem audit mutu pendidikan yang transparan. Hasil evaluasi ini hendaknya menjadi pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pengembangan pendidikan vokasional di tingkat daerah maupun nasional.

4) Pemerintah Daerah harus mengambil langkah-langkah konkret untuk mengatur bagaimana dunia kerja dapat lebih berpartisipasi untuk mendukung pendidikan SMK dengan menerapkan program bersama dan saling menguntungkan untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas dan siap kerja. Untuk memungkinkan hubungan kemitraan yang lebih erat antara dunia kerja dan SMK, diperlukan peraturan-peraturan yang mengikat seperti ditambahkannya program insentif bagi mitra industri yang berpartisipasi dalam kegiatan kemitraan.